



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 180/269 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 180/31
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penguatan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Purbalingga dan mempermudah pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia serta pengumpulan data Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia perlu dibentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/31 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 180/31 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya perubahan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan penambahan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Panitia dan Sekretariat RANHAM yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/2019 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 180/81 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI
 NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019
 RENCANA KEANGGOTAAN PANITIA

NO	JABATAN DALAM KEDINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Kepala Kejaksaan Purbalingga	Pengarah
3	Kepala Polres Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Pengarah
5	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Pengarah
6	Komandan Pangkalan Udara Jend. Besar Soediman Purbalingga	Pengarah
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
9	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
10	Kepala BAPPETBANODA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA :


DYAH HAYUNG PRATIWI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/269 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 180/ 31 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA RENCANA AKSI
 NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Kepala Kejaksaan Purbalingga	Pengarah
3	Kepala Polres Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Pengarah
5	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Pengarah
6	Komandan Pangkalan Udara Jend. Besar Soedirman Purbalingga	Pengarah
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
10	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 1800/2019 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 1501/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
 PANITIA RENCAHA AKSI NASIONAL HAK ASASI
 MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA RENCAHA
 AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JARATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEUDUKAN DALAM PANITIA
1	Kepala Bidang Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubag Bagian Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kepala DINOSDADUKURBA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPEDALBANGGA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kasubag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	2 (dua) orang belkamsa Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	1 (satu) orang belkamsa pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	1 (satu) orang belkamsa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	1 (satu) orang belkamsa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	1 (satu) orang belkamsa pada Dinas Perumahan dan Perumahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	1 (satu) orang belkamsa pada DINOSDADUKURBA Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	1 (satu) orang belkamsa pada DINAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 180/ 269 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
 180/ 31 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN
 PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
 MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA RENCANA
 AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPEDALITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasubbag. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	5 (lima) orang pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	1 (satu) orang pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	1 (satu) orang pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	1 (satu) orang pelaksana pada DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	1 (satu) orang pelaksana pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI